



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Pengaruh Fungsi Anggaran Dan Fungsi Pengawasan Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Sigi

The Influence of Budget Function and Supervisory Function on Regional Financial Performance at the Sigi Regency DPRD Secretariat

Haziza^{1*}, Rajindra², Farid³, Nursiah⁴, Rahmiwati Habibu⁵

¹Mahasiswa Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Palu

²⁻⁵Dosen Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Palu

*Corresponding Author: E-mail: hazizah9910@gmail.com

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 2 May, 2024

Revised: 22 June, 2024

Accepted: 01 July, 2024

Kata Kunci:

Fungsi Anggaran; Fungsi Pengawasan; Kinerja Keuangan

Keywords:

Budget Function; Supervisory Function; Financial Performance

DOI: [10.56338/jks.v7i8.6829](https://doi.org/10.56338/jks.v7i8.6829)

ABSTRAK

Pengelolaan keuangan daerah merupakan aspek krusial dalam upaya mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dan berkelanjutan. Kinerja keuangan daerah yang optimal tidak hanya mencerminkan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan anggaran, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan daerah yang lebih merata dan berkeadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh fungsi anggaran dan fungsi pengawasan terhadap kinerja keuangan daerah pada Sekretariat DPRD Kabupaten Sigi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan di Sekretarian DPRD Kabupaten Sigi. Kemudian penelitian ini di laksanakan selama 3 bulan dari bulan Januari-Maret Tahun 2024. Adapun sampel dalam penelitian ini berjumlah 47 orang. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan program computer aplikasi SPSS versi 22. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh fungsi anggaran terhadap Kinerja keuangan daerah pada Sekretariat DPRD Kabupaten Sigi. Selanjutnya terdapat pengaruh fungsi pengawasan terhadap Kinerja keuangan daerah pada Sekretariat DPRD Kabupaten Sigi. Fungsi anggaran dan fungsi pengawasan DPRD secara simultan berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah pada Sekretariat DPRD Kabupaten Sigi.

ABSTRACT

Regional financial management is a crucial aspect in efforts to achieve good and sustainable governance. Optimal regional financial performance not only reflects efficiency and effectiveness in budget use, but also contributes to more equitable and equitable regional development. This study aims to analyze the influence of the budget function and the supervisory function on regional financial performance at the Sigi Regency DPRD Secretariat. The type of research used is quantitative research with a descriptive approach. This research was conducted at the Sigi Regency DPRD Secretariat. Then this research was carried out for 3 months from January to March 2024. The sample in this study amounted to 47 people. The data analysis technique used in this study used the SPSS version 22 application computer program. This study shows that there is an influence of the budget function on regional financial performance at the Sigi Regency DPRD Secretariat. Furthermore, there is an influence of the supervisory function on regional financial performance at the Sigi Regency DPRD Secretariat. The budget function and the DPRD supervisory function simultaneously affect regional financial performance at the Sigi Regency DPRD Secretariat.

PENDAHULUAN

Keuangan daerah merupakan elemen krusial dalam sistem pemerintahan yang menentukan efektivitas pembangunan regional dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks pemerintahan daerah di Indonesia, anggaran yang disusun harus mampu mencerminkan prioritas dan kebutuhan masyarakat lokal. Anggaran ini harus direncanakan dan digunakan dengan cara yang paling efektif untuk memaksimalkan manfaat sosial dan ekonomi. Selain itu, fungsi pengawasan menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa anggaran tersebut digunakan sesuai dengan perencanaan yang telah

ditetapkan dan tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan keuangan daerah.

Untuk mencapai suatu kinerja atau hasil kerja organisasi dengan baik, maka hal pertama yang diperlukan yaitu adanya sebuah perencanaan atau rencana kerja yang, terarah atau setiap step atau langkah-langkahnya jelas, dan komprehensif, sehingga dengan begitu maka akan memudahkan bagi manajemen untuk mengendalikan kegiatan operasional dari organisasi tersebut. Hasil kerja tersebut akan disajikan dalam bentuk anggaran yang disusun oleh manajemen berdasarkan target atau sasaran yang disesuaikan dengan kondisi maupun kebutuhan dari sebuah organisasi, yang periodenya bersifat satu tahun, maupun periode yang bersifat lebih dari satu tahun, dan disusun dengan format tertentu (Salbiah dan Rizky, 2012).

Penyusunan anggaran merupakan tahap yang sangat penting karena anggaran yang tidak efektif atau tidak efisien dan tidak berorientasi pada hasil kerja maka bisa saja justru akan menggagalkan program yang telah disusun sebelumnya. Dalam pelaksanaannya atau aktualisasi nya, dalam proses penyusunan anggaran seakan-akan hanya bagian yang terpisah dengan perumusan dan perencanaan strategic, sehingga keberhasilan pelaksanaan atau penerapan anggaran tidak sesuai dengan keberhasilan/kinerja program dan tujuan dari organisasi itu sendiri. Dengan demikian maka hasil akhirnya yaitu tidak akan menghasilkan anggaran yang efektif sebagai alat manajemen untuk menjembatani pencapaian tujuan organisasi (Basri, 2013)

Satuan Kerja Pemerintah Daerah dalam hal ini pemerintah-pemerintah daerah, sama halnya dengan organisasi yang lain yang tentunya akan membuat sebuah perencanaan, dengan demikian langkah awal yang akan dilakukan yaitu membuat sebuah rencana anggaran dimana tetap mengikuti standar yang telah ditentukan utamanya dalam hal pencapaian tujuan sebuah organisasi (budgetary goal characteristics). Dengan demikian sangat diharapkan perencanaan yang telah disusun dapat menjadi faktor yang berpengaruh terhadap peningkatan hasil kerja dari seseorang pada instansi pemerintah daerah, karena ketika pemerintah daerah ingin berpartisipasi dalam menyusun anggaran, melaksanakan anggaran dan melakukan evaluasi tentang pencapaian anggaran yang telah di tentukan maka kinerjanya kan menjadi baik pula. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun berdasarkan pendekatan kinerja, yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. APBD disusun berdasarkan pada sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran.

Untuk meminimalisir terjadinya sebuah permasalahan dalam penganggaran maka penting dilakukan adanya pengawasan dengan tujuan untuk melihat apakah terjadi penyimpangan terhadap APBD yang telah direncanakan atau tidak. Suatu pengawasan dikatakan penting karena tanpa adanya pengawasan yang baik tentunya akan menghasilkan tujuan yang kurang memuaskan, baik bagi organisasi itu sendiri maupun bagi para pekerja nya.

Pengawasan yang dilakukan oleh anggota dewan atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap SKPD (satuan kerja perangkat daerah) sangat penting dilakukan, karena pengawasan merupakan tugas atau fungsi dari DPRD itu sendiri dimana bentuk upaya untuk menjamin adanya kesesuaian antara penyelenggaraan tugas pemerintah di daerah (pusat) dan menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintah secara berdaya guna (Halim, 2004).

Peraturan Pemerintah Pasal 4 No.105 Tahun 2000 mengatur tentang Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah telah ditetapkan, dimana menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara disiplin, patuh pada peraturan-peraturan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan atas prevalent atau tidak membedakan golongan tertentu. Apabila pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan baik sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, maka tentunya akan meningkatkan kinerja pemerintah itu sendiri (Juliawati, Darwanis, Jalaluddin, 2012).

Pengelolaan keuangan daerah yang efektif adalah salah satu kunci utama dalam mencapai pembangunan daerah yang berkelanjutan. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memainkan peran penting dalam proses penganggaran dan pengawasan keuangan daerah. Kabupaten

Sigi, sebagai salah satu daerah di Indonesia, menghadapi tantangan dalam meningkatkan kinerja keuangan yang berkesinambungan.

Fungsi anggaran di DPRD Kabupaten Sigi tidak hanya bertujuan untuk merencanakan dan mengalokasikan sumber daya keuangan daerah tetapi juga harus memastikan bahwa alokasi tersebut mencapai efisiensi dan efektivitas dalam pemanfaatannya. Disisi lain, fungsi pengawasan menjadi kunci dalam memonitor dan mengevaluasi penggunaan anggaran yang telah ditetapkan, untuk memastikan bahwa setiap unit pemerintahan bekerja sesuai dengan peraturan dan tidak terjadi penyimpangan.

Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis mendalam mengenai bagaimana fungsi anggaran dan pengawasan dapat mempengaruhi kinerja keuangan daerah secara efektif, khususnya di Sekretariat DPRD Kabupaten Sigi.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan di Sekretarian DPRD Kabupaten Sigi. Kemudian penelitian ini di laksanakan selama 3 bulan dari bulan Januari- Maret Tahun 2024. Adapun sampel dalam penelitian ini berjumlah 47 orang. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan program computer aplikasi SPSS versi 22.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Fungsi Anggaran DPRD Dalam Kinerja Keuangan Daerah Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Sigi

Penelitian ini diperoleh dari pembagian kuesioner kepada responden yaitu sebanyak 48 Responden, dimana terdiri dari 7 item pernyataan untuk variabel bebas (Fungsi anggaran) dan 7 item pernyataan untuk variabel terikat (Kinerja Kuangan Daerah).

Untuk melihat pengaruh fungsi anggaran terhadap kinerja keuangan daerah maka dilakukan Uji T (Parsial) yaitu didapatkan nilai thitung > ttabel ($2,349 > 2.01537$) dan nilai sig ($0,023 < 0,05$) maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan antara variabel Fungsi anggaran dengan variabel kinerja kuangan daerah. Fungsi anggaran merupakan salah satu hak yang sangat penting dilakukan oleh pemerintah dalam mengelola keuangan daerah (Yuliastati, 2009).

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fauzan (2012) hasil penelitian menunjukkan ada pengaruh yang signifikan positif antara pelaksanaan anggaran terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dengan nilai t hitung > t tabel yaitu $2,982 > 2,03011$ dengan nilai signifikansi $0,005 < 0,05$ (H1 diterima).

Penelitian (Siregar 2019) diperoleh bahwa kualitas anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Hal ini disebabkan pentingnya kualitas anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) baik berupa perencanaan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, dan evaluasi anggaran merupakan faktor penting dalam meningkatkan kinerja keuangan daerah secara ekonomis, efisien, dan efektif. Faktor terpenting dan paling menentukan adalah evaluasi anggaran yang ditunjukkan dengan loading faktor tertinggi. Hal ini menunjukan bahwa evaluasi anggaran yang dilakukan secara optimal akan menghindari terjadi penyimpangan dan kecurangan sehingga akan meningkatkan kinerja keuangan yang efisien dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa tinggi dan rendahnya kualitas anggaran akan mempengaruhi tinggi dan rendahnya kinerja keuangan, dengan kata lain apabila kualitas anggaran tinggi maka kinerja keuangan akan meningkat sebaliknya apabila kualitas anggaran rendah maka kinerja keuangan juga rendah.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian (Made dan Wulandari 2019) yang menyatakan bahwa tujuan fungsi anggaran adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengeluaran publik dengan mengaitkan pendanaan organisasi sektor publik dengan hasil yang dicapai dengan penggunaan

informasi kinerja secara sistematis. (Lubis 2009) berdasarkan hasil uji hipotesis dan analisis regresi menunjukkan bahwa variabel fungsi anggaran memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uji hipotesis bahwa fungsi anggaran memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh Fungsi Pengawasan Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Sigi

Penelitian ini diperoleh dari pembagian kuesioner kepada responden yaitu sebanyak 47 orang, dimana terdiri dari 7 item pernyataan untuk variabel bebas (Fungsi pengawasan) dan 7 item pernyataan untuk variabel terikat (kinerja keuangan daerah).

Untuk melihat pengaruh fungsi pengawasan terhadap kinerja keuangan daerah maka dilakukan Uji T (Parsial) yaitu didapatkan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3,432 > 2.01537$) dan nilai sig ($0,001 < 0,05$). Dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan antara variabel Fungsi pengawasan dengan variabel kinerja keuangan daerah. Pelaksanaan fungsi pengawasan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Sigi memiliki pengaruh dalam kinerja keuangan daerah karena dalam pelaksanaan pengawasan secara langsung maka anggota DPRD mendapatkan informasi yang akurat. Tujuan dari penerapan fungsi pengawasan sebagai salah satu dari fungsi DPRD tersebut untuk mencegah sekecil dan sedini mungkin terjadinya suatu penyimpangan dalam pelaksanaan suatu pekerjaan atau tugas. Jika suatu proses pelaksanaan dilakukan tanpa adanya pengawasan maka bisa saja terjadi proses penyimpangan atau bertentangan dari prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Hal ini banyak terjadi terutama dalam hal keuangan. Pengawasan anggota dewan pada tahap pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah yaitu dilakukan pada saat kerja dengan unsur pemerintahan daerah, yang nantinya akan dirumuskan menjadi kebijakan daerah. Anggota dewan atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juga akan melakukan kunjungan ke daerah-daerah, tempat dimana program yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dilaksanakan, dengan tujuan untuk melihat apakah program tersebut sudah sesuai dengan rencana semula dan mencapai sasaran yang diinginkan/diharapkan atau tidak.

Menurut (Kasenda, dkk 2020) pengawasan DPRD merupakan fungsi terakhir yang dimiliki DPRD, hal ini karena obyek-obyek yang diawasi DPRD merupakan kebijakan-kebijakan maupun program-program yang dihasilkan fungsi legislasinya maupun fungsi anggaran, oleh karena itu keseluruhan fungsi-fungsi yang dimiliki DPRD sangat berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Ada beberapa tahapan mekanisme pelaksanaan pengawasan DPRD yaitu tahapan perencanaan APBD, tahapan pelaksanaan dan tahapan evaluasi.

Menurut (Kamilah, 2014) pengawasan yang dilakukan oleh DPRD dapat dilakukan sejak tahap perencanaan, hal ini penting karena DPRD memiliki kewenangan untuk menilai dan membuat rancangan peraturan daerah dan memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah. Dalam pengawasan ini DPRD memiliki wewenang dalam melakukan pengawasan mulai dari serap aspirasi masyarakat hingga APBD itu selesai dibuat.

Menurut (Tjanne, dkk 2018) Ada tiga tahapan dalam melakukan pengawasan terkait APBD yaitu:

1. Pengawasan awal yang merupakan pengawasan yang dilakukan pada saat dimulainya pelaksanaan pekerjaan. Pengawasan awal yang dilakukan DPRD yaitu menampung aspirasi masyarakat, menetapkan petunjuk dan kebijakan publik tentang APBD dan menentukan strategi dan prioritas APBD, melakukan klasifikasi dan ratifikasi dan mengambil keputusan dan pengesahan.
2. Pengesahan proses merupakan pengesahan yang dilakukan pada saat sebuah proses pekerjaan tengah berlangsung dan untuk memastikan apakah pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Pada tahap ini pengawasan dilakukan melalui pengawasan melalui komisi dan melakukan pengawasan melalui hak-

hak yang dimiliki oleh DPRD.

3. Pengawasan akhir yaitu pada tahap berakhirnya tahun anggaran pelaksanaan APBD, pemimpin daerah dalam hal ini Bupati melakukan kegiatan yakni Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKP) kepada DPRD yang dilakukan dalam sidang paripurna DPRD.

Menurut (Anisatul, dkk 2016) pengawasan internal penting dilakukan untuk mencegah terjadinya beberapa penyimpangan dalam mencapai tujuan dan pelaksanaan tugas-tugas organisasi. Semakin tinggi pengawasan internal maka kinerja keuangan pemerintah daerah akan semakin tinggi.

(Made, dkk 2015) hasil penelitiannya mengatakan bahwa Pengawasan Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng.

Pengaruh Fungsi Anggaran dan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Sigi

Hasil penelitian melalui uji F (uji simultan) menunjukkan bahwa variabel fungsi anggaran dan fungsi pengawasan mempunyai pengaruh simultan atau pengaruh secara bersama-sama yang signifikan terhadap variabel kinerja keuangan daerah.

Kualitas fungsi anggaran yang baik akan sangat mempengaruhi kinerja keuangan daerah begitupun dengan penerapan fungsi pengawasan di DPRD Kabupaten Sigi dimana bertujuan untuk melihat secara langsung apakah ada penyimpangan dari yang telah ditentukan (sesuai) atau tidak. Ketika ditemukan dilapangan ada masalah maka akan mempengaruhi saran dan masukan anggota DPRD pada saat melakukan penganggaran. Upaya untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran daerah, maka dalam hal inilah fungsi penting dari DPRD dalam melakukan pengawasan suaya penggunaan anggaran yang telah disetujui pada setiap tahun tersebut betul-betul sesuai dengan sasaran kinerja yang akan dicapai.

KESIMPULAN

Terdapat pengaruh secara parsial fungsi anggaran terhadap Kinerja keuangan daerah pada Sekretariat DPRD Kabupaten Sigi. Terdapat pengaruh secara parsial fungsi pengawasan terhadap Kinerja keuangan daerah pada Sekretariat DPRD Kabupaten Sigi. Fungsi anggaran dan fungsi pengawasan DPRD berpengaruh secara simultan terhadap kinerja keuangan daerah pada Sekretariat DPRD Kabupaten Sigi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggasta, E. G., & Murtini, H. (2014). Determination Senjangan Anggaran dengan Asimetri Informasi sebagai Pemoderasi. *Accounting Analysis Journal*, Vol. 3 No. 4.
- Anggraeni, Rafika. 2009. Pengaruh Partisipasi Anggaran dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja SKPD Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu. Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Anisatul, dkk .2016. Pengaruh Pengawasan Internal, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Karanganyar (Survey pada DPPKAD Kabupaten Karanganyar). Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Slamet Riyadi Surakarta. ISSN 2460-0784.
- Ardila, Lisa, 2013. Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Senjangan Anggaran Dengan Menggunakan Ambiguitas Peran Dan Asimetri Informasi Sebagai Pemoderasi (Studi Empiris Pada Pemerintah Kota Padang).Jurnal. S-1 UNP.

asri, Ramlah. (2013). Analisis Penyusunan Anggaran dan Laporan Realisasi Anggaran pada BPM-PD Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal EMBA. Vol.1 No.4, pp 202-212.

Azwar. (2012). Metode Penelitian: Yogyakarta. Pustaka pelajar.

Chow, C.W., Ganulin, D., Haddad, K. and Williamson, J. 1998. The balanced scorecard: a potent tool for energizing and focusing health-care organization management. Journal of Health-care Management.

Djiloly, Novita Lerly. Pengaruh Pengawasan Intern, Perencanaan, Dan Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi. Jurnal Katalogis. Vol.4(6). pp.70-82.

Espinoza. 2014. Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Medan. Laporan Penelitian. Universitas Sumatera Utara Medan.

Fatikah R, Dewi Noor. 2013. Kajian Analisis Standar Belanja Pemerintah Kota Batu. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB, Vol. 1, No 2, Hal. 1-15.

Febrina Astria Verasvera. 2016. Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat).

Fifit & Nadirsyah. 2016. Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas, dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada Kabupaten Aceh Barat Daya. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi. Vol. 1 No. 2.

Fitrianingrum, Eva Dilla. 2015. Pengaruh Pengawasan Terhadap Disiplin Kerja Pegawai Pada Kantor Kecamatan Samarinda Ulu. FISIP UNMUL : Samarinda.

Ghozali, Imam. 2013. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Ghozali, Imam. 2006. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS (Edisi Ke 4). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Halim. 2004. Manajemen Keuangan Daerah. Edisi Revisi. Yogyakarta: UPP AMP YPKN.

Halim, Abdul. 2007. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta : Salemba Empat.

Halim. 2012. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Keempat. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.

Halim. (2014). Manajemen Keuangan Sektor Publik problematika penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Jakarta: Salemba Empat.

Handoko, T. Hani. 2009. Manajemen. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.

- Haslindah.2016. Pengaruh Perencanaan Anggaran Dan Evaluasi Anggaran Terhadap Kinerja Organisasi Dengan Standar Biaya Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo).Skripsi.UIN Makassar.
- Juliawati, Ebit, Darwanis, & Jalaluddin. 2012. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh. Jurnal akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala. vol. 1 no. 1. hal. 15-29.
- Kamilah, A.,2014. Pengembangan Modul Biologi Berbasis Islam-Sains Sebagai Bahan Ajar Mandiri Pada Sub Materi Pokok Komponen Ekosistem Untuk Siswa Kelas X Madrasah Aliyah (MA). Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Kasenda,dkk.2020. Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Pengelolaan APBD Kota Manado. Program Studi Megister Pengelolaan Sumber Daya Pembangunan, Pascasarjana Universitas Sam Ratulagi.Vol.1(1).
- Latuheru, Belianus Patria. (2005). Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Senjangan Anggaran Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating. Jurnal Akuntansi dan Keuangan. Vol.7, No.2, Nopember 2005, hal:117-130.
- Lubis, Hijrani Putri, 2009. Analisis Pengaruh Pemberlakuan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang. Jurnal Akuntansi. Fakultas Ekonomi, Universitas Sumatra Utara.
- Made dan Wulandari .2019. Analisis Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kota Malang. JRMA, Volume 7. ISSN. 2337-5663.
- Made, dkk. 2015. Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng.e-Journal S1 Ak Universitas Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 3 No. 1 Tahun 2015)